

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 01 TENTANG LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH
KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

OLEH:

FITRI RAHMADANI
NIM. 51.14.3.207

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Rahmadani
NIM : 51143207
Tempat/tgl. Lahir : Subulussalam, 05 Februari 1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. Amal, Medan Sunggal No. B22

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2014-2015)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 25 juli 2018

Yang membuat pernyataan



Fitri Rahmadani
NIM: 51143207

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (PSAP) NO 01 TENTANG LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

Oleh:

FITRI RAHMADANI

NIM. 51143207

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Keuangan Syariah

Medan, Juli 2018

PEMBIMBING I



Dr. Saparuddin Siregar, SE, AK, M.Ag, SAS, CIA

NIP: 196307182001121001

PEMBIMBING II




Laylan Syafina, M.Si

NIP: 1991082672018012002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, M. Pd

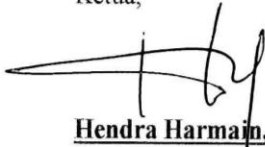
NIP: 197305101998031003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAP) NO. 01 TENTANG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KOTA SUBUSSALAM (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA SABUSSALAM)” an. Fitri Rahmadani, NIM. 51143115 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyhkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 14 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah

Medan, 14 Agustus 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Sekretaris,



Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIB. 1100000091

Anggota

Pembimbing I



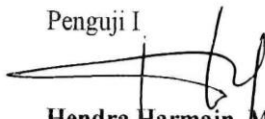
Dr Saparuddin Siregar, SE, AK, M.Ag, SAS, CA
NIP. 196307182001121001

Pembimbing II



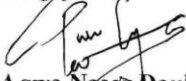
Lavlan Syafina, M.Si
NIP. 1991082672018012002

Penguji I



Hendra Harmain, M.Pd
M.Si NIP. 197305101998031003

Penguji II



Aqwa Naser Daulay,
NIB. 1100000091

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumatera Utara Medan



D. Anwar Soemitra, M.Ag

NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Skripsi berjudul, “ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN SATANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 01 TENTANG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM”

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Apakah Laporan Pemerintah Kota Subulussalam telah disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang Laporan Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam telah memenuhi persyaratan penyajian laporan keuangan menurut PSAP No. 01, menyesuaikan struktur laporan keuangan pemerintah kota Subulussalam dengan PSAP No. 01 dan melihat apakah isi laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam memenuhi persyaratan minimum isi laporan keuangan sebagaimana dalam PSAP No. 01.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam telah melakukan proses Penyusunan Laporan Keuangan akuntansinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01, untuk proses pencatatannya telah sesuai juga, walaupun ada sedikit kekurangan dalam mencantumkan unsur-unsur pada Laporan Realisasi Anggaran, namun Laporan Keuangan telah diajikan tepat waktu sehingga bisa digunakan oleh kelompok pengguna Laporan Keuangan guna mengambil keputusan.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telam melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dedengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat manusia terhadap kehidupan yang lebih baik serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya.

Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Pernyataan Satandar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No. 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2014-2015”**) Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua, Ibunda Rosmala yang senantiasa memberikan semangat, materi, dan selalu berdoa kepada Allah SWT untuk demi terselesainya skripsi ini. Semoga kemuliaan dan perlindungan Allah SWT selalu menyertainya.
2. Untuk seluruh keluarga saya yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan doanya selama ini.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Hendra Hermain SE, AK., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

5. Ibu Kamila, SE, AK., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Bapak M. Ikhsan, ST. M.Com selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi saran, bimbingan, nasihat dan pengarahan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang senantiasa memberikan motivasi, saran, bimbingan dan pengarahan kepada penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Laylan Syafina, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang senantiasa memberikan motivasi, saran, bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
10. Seluruh karyawan di Instansi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam, yang telah banyak memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan dalam rangka penulisan skripsi ini.
11. Sahabat – sahabat manuju syurga Siska Yunita, Siti Aisyah, Wiwit Muliono, Yamin Harahap, dan Bayu Lian yang juga selalu sama-sama mensupport untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seangkatan yang senantiasa memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Juli 2018

Penulis,

FITRI RAHMADANI

NIM: 51143207

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Poin Penting Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Masalah	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akuntansi	7
B. Akuntansi Pemerintahan	9
C. Akuntansi Pemerintah Daerah	14
D. Perbedaan Akuntansi Komersial dengan	
Ak. Pemerintahan	28
E. Kerangka Pemikiran	30
F. Kajian Terdahulu	31

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	34
B. Variabel Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Teknik Penelitian	36
E. Teknik Analisis Data	38
F. Garis Besar Isi Skripsi (Outline)	39
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	40
B. Hasil Temuan Penelitian	47
1. Perlakuan Akuntansi Keuangan pada Pem. Kota Subulussalam	47
2. Penyajian Laporan Keuangan pada Pem. Kota Subulussalam	53
3. Analisis Penulis	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Berpikir Penelitian 30
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bagam Baru..... 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	
Daftar Pertanyaan Wawancara.....	69
Hasil Wawancara	73
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusan dipemerintah.

Pemerintah mempunyai tujuan utama memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan akuntansi yang berbeda dengan akuntansi komersial pada umumnya, lembaga pemerintahan harus menyediakan sumber-sumber tertentu dengan sukarela dan memungut iuran dari masyarakat dalam bentuk pajak yang diurus secara efektif dan digunakan untuk pelayanan yang bermanfaat.

Meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, mengakibatkan peran akuntabilitas, mengakibatkan peran akuntansi dalam pemerintahan dilingkungan sektor publik juga semakin meningkat. Penggunaan akuntansi selama ini hanya diterapkan secara utuh, pada organisasi sektor swasta. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparatur pemerintah yang belum begitu memahami arti penting dari akuntansi pemerintah, baik dari segi ilmu maupun dari segi praktek.

Untuk merealisasikannya, pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah keluarnya kedua undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan yaitu diantaranya

adalah: peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem keuangan pemerintah yang memberikan definisi terhadap akuntansi pemerintahan daerah sebagai proses pencatatan pengelolaan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umum bersifat keuangan termasuk pelaporan-pelaporan atas realisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sepublik sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidak hanya sampai disitu, selanjutnya ditetapkan peraturan pemerintah No. 13 Tahun 2006 sebagai kelanjutan pemerintah untuk memperbaiki sistem keuangan pemerintah daerah, agar:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan pertanggungjawaban pimpinan atau manajer perusahaan, karena laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Laporan keuangan merupakan sumber informasi, baik bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan, juga informasi bagi pihak luar pemerintah seperti perusahaan, bank, investor, maupun calon investor. Kepentingan pengguna laporan keuangan berbeda, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Setiap Negara memiliki standar akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Sesuai amanat undang-undang yaitu pasal 5 ayat 2 UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tanggal

13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005.¹

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi disemua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (BUMD).²

Setiap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1. Tentang Laporan Keuangan Pemerintah. PSAP No. 1 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai Laporan Keuangan. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pelanggaran hukum masih menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk program-program kemakmuran rakyat.³

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa secara konsepsi akuntansi meindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Subulussalam pada tahun 2015, belum dapat diyakini kewajarannya. Sebab,

¹ Nordiawan, D., Iswahyudi, S. P., dan Maulidah, R. *Akuntansi Pemerintahan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 24

² Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

³ Ridho Syukro, <http://www.beritasatu.com>. Diunduh pada tanggal 25 Januari 2018.

ada beberapa laporan keuangan di Pemerintah Kota Subulussalam yang penyusunan dan penyajian laporan keuangannya masih terdapat kecacatan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) yang disajikan oleh pemerintah daerah kota Subulussalam, tidak menggambarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang wajar sehingga tidak diyakini kebenarannya.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut menimbulkan dugaan adanya kekurangsesuaian penyusunan Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Subulussalam dengan standar yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Subulussalam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam telah disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.01 tentang Laporan Keuangan?”

C. Tujuan dan Poin Penting Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan pada Pemerintah Kota Subulussalam. Adapun poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam telah memenuhi persyaratan penyajian laporan keuangan menurut PSAP. 01.
2. Apakah struktur laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan struktur laporan keuangan sebagaimana dalam PSAP. 01.
3. Apakah isi laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam memenuhi persyaratan minimum isi laporan keuangan sebagaimana dalam PSAP 01.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti/penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Subulussalam dan untuk mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan khususnya mengenai prosedur penyusunan Laporan Keuangan dan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dalam melaksanakan yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan.

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama.

E. Batasan Masalah

Setelah penulis mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah kota Subulussalam, ternyata ada suatu indikator yang menarik perhatian penulis bahwasanya laporan keuangan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja kota (APBK) tahun 2015 mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh. Dari informasi tersebut, penulis mengidentifikasi adanya kesalahan dari penulisan jumlah anggaran rincian belanja pada tahun 2015 sehingga terjadi permasalahan dalam pertanggung jawaban laporan keuangan, dan penyajian laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang Laporan Keuangan.⁴

Berdasarkan latar identifikasi masalah diatas, peneliti hanya membatasi penelitiannya pada pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam untuk tahun 2015, karena hanya ditahun inilah

⁴<https://www.goaceh.co/berita/baca/2016/07/23/laporan-keuangan-apbk-subulussalam-2015-dari-wtp-menjadi-wdp/#sthash.VfhgkiKG.dpbs>. Diunduh pada tanggal 9 maret 2018.

laporan keuangan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja kota (APBK) tahun 2015 mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP), dan Laporan Keuangan pada tahun ini tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang Laporan Keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, *et al.* Mendefinisikan “akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/infomasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.”⁵ Sebagai sistem, akuntansi terdiri atas input yaitu transaksi, proses yaitu kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa laporan keuangan. Berdasarkan pengertian diatas, pengertian akuntansi terdiri atas empat hal penting, adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Input (masukan) akuntansi adalah transaksi yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada bukti yang menyertainya. Tanpa ada bukti yang autentik, maka suatu transaksi tidak dapat dicatat dan dibukukan oleh akuntansi.
- 2) Proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan.
- 3) Output (keluaran) akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Secara umum, akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.⁷ Akuntansi dibedakan ke

⁵Dwi Martani, *et. al, Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 5.

⁶ *Ibid. Akuntansi Keuangan Menengah...*, h. 5.

⁷ James M. Reeve, *et. al, Pengantar Akuntansi: i Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 9.

dalam akuntansi komersial dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor publik pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.⁸

a. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Berdasarkan Sektor Publik

Tujuan pelaporan keuangan bagi sektor publik secara umum diuraikan seperti berikut ini:⁹

- 1) *Compliance and stewardship* (kepatuhan dan pengelolaan).
- 2) *Accountability and Retrospective Reporting* (Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif).
- 3) *Planning and authorization information* (perencanaan dan otorisasi informasi).
- 4) *Liability* (kelangsungan organisasi).
- 5) *Public Relation* (hubungan masyarakat).
- 6) *Source of Fact and Figures* (sumber fakta dan gambaran).

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan pelaporan keuangan adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan (*accountability and stewardship*).
- 2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan ekonomi.
- 3) Kinerja manajerial dan organisasional (*managerial and control*)

⁸ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 3, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 1.

⁹ *Ibid*, h. 20.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan ekonomi, sosial dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk:

- a) Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan anggaran,
- b) Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.
- c) Membantu tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.
- d) Membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas.

Menurut Mardiasmo tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:¹⁰

- a) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)
- b) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)
- c) Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*)
- d) Kelangsungan organisasi (*viability*)
- e) Hubungan masyarakat (*publik relation*)
- f) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

B. Akuntansi Pemerintahan

1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi keuangan Pemerintahan sebagaimana disebut dalam pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Nordiawan Deddi dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 126.

- 1) Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Negara/Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.
- 2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Akuntansi keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat / Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pelaksanaan akuntansinya, Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06.2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP), yang ada dipusat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang dikerjakan di setiap Kementerian Negara / Lembaga.

SAP terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas pemerintah Pusat, dan Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Kantor Akuntansi Regional (KAR) yang memproses data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kantor Akuntansi Khusus (KAK) yang memproses data dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan KPPN khusus.

Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan

¹¹ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 3, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 25.

Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, setiap Kementerian/Lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tahunan dimaksud dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (yang ada dibawah pengawasannya) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dikirimkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Pasal 1 PP Nomor 71 Tahun 2010) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (2), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka telah diputuskan oleh Pemerintah dengan menetapkan: peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, masih menggunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling

lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, PP Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti, dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, yang diterbitkan dan ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 2010.¹²

b. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas menuju Akrual

Dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menurut sari pasal-pasalnya (PP Nomor 71 Tahun 2010) antara lain (Pasal 4-5-6 dan 8) disebutkan sebagai berikut:

“Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP, dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan SAP Pasal 4 ayat (1-2-3-4))”

Dalam hal ini diperlukan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. (pasal 5 ayat (1-2-3-4)) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada SAP, dilakukan oleh:

- 1) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- 2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- 3) Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada sub a) (ayat (2)) dan sub b) (ayat (3)) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah pusat

¹² *Ibid, Akuntansi Sektor Publik*, h. 120.

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, dan pada pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (menurut Pasal 7 ayat (1-2-3)).

SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan dalam bentuk PSAP, dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pasal 8 ayat (1-2-3).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 memiliki dua buah lampiran. Lampiran I merupakan standar akuntansi berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari:

- 1) Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
- 2) PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan
- 3) PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- 4) PSAP 03: Laporan Arus Kas
- 5) PSAP 04: Catatan atas laporan keuangan
- 6) PSAP 05: Akuntansi Persediaan
- 7) PSAP 06: Akuntansi Investasi
- 8) PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap
- 9) PSAP 08: Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- 10) PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
- 11) PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
- 12) PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian
- 13) PSAP 12: Laporan Operasional.

Struktur pada Lampiran II peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, meliputi:

- 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- 2) PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan

- 3) PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran
- 4) PSAP 03: Laporan Arus kas
- 5) PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan
- 6) PSAP 05: Akuntansi Persediaan
- 7) PSAP 06: Akuntansi Investasi
- 8) PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap
- 9) PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 10) PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
- 11) PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- 12) PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian.

C. Akuntansi Pemerintah Daerah

1. Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi Keuangan daerah adalah akuntansi yang dipakai oleh Pemerintahan Daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

2. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

SAPD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. Seperti halnya, SAPP, SAPD juga terdiri atas dua sub sistem berikut.

1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

SAPD ini dilaksanakan oleh PPKD. PPKD akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemerintah daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, antuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, serta hutang jangka panjang.

2) Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sistem Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan

¹³ *Ibid, Akuntansi Sektor Publik..*, h. 115.

realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:¹⁴

- 1) Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2) Manajemen, yaitu membantu para pengguna laporan keuangan untuk kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-undangan.
- 4) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*), yaitu membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.¹⁵

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan keluaran (*output*) dari sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, sedangkan system akuntansi dikembangkan sesuai dengan kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan operasional organisasi

¹⁴ Nordiawan Deddi dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 201.

pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Ciri-ciri keuangan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain meliputi:

a) Sistem Penganggaran Pemerintah Daerah

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, serta pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Oleh karena itu, fungsi anggaran dilingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- (1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- (2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- (3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- (4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- (5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Atas pertimbangan ini maka sistem penganggaran pada pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam pengembangan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang merupakan realisasi atas belanja, pendapatan dan pembiayaan yang telah

dianggarkan, disusun berdasarkan basis kas. Jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA pun disusun berdasarkan basis akrual.

a) Investasi dalam Aset yang tidak langsung

Menghasilkan pendapatan investasi yang ditanamkan oleh suatu organisasi selalu diharapkan dapat memberikan hasil yang sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Di dalam organisasi nirlaba seperti pemerintahan, hal ini tidak dapat dilakukan mengingat tujuan dan fungsi dari pemerintahan itu sendiri. Pemerintah daerah adalah organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi memberi layanan kepada masyarakat pada setiap kegiatan operasional yang dilakukannya.

Dalam rangka memberi layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jaalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud meempunyai masa manfaat yang lama sehingga diperlukan program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

b) Penyusutan Nilai Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset, maka dilakukan penyesuaian nilai berupa penyusutan nilai aset. Penyusutan nilai aset tersebut dilakukan dengan berbagai

metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*servicepotential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan suatu sistem akuntansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi dalam rangka penyusunan keuangan tersebut. Sistem akuntansi pemerintah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 angka 11 adalah rangkaian sistematis prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 01, Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 2 Tahun 1980 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* mengisyaratkan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki

Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Agar informasi yang disajikan dapat relevan maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan pemerintah.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian Jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksiserta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan maka penyajian laporan keuangan pemerintah minimal harus disajikan dalam 2 (dua) periode atau 2 (dua) tahun anggaran.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

*[282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....]*¹⁶

5. Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Menteri Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara pentafsiran Al-qur'an, 1971), h. 70

¹⁷ Yuswar Effendy, *dkk Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing. 2015), h. 189

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- 1) Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

b) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non lancar).

Neraca menggambarkan Penyusunan dan penyajian Aset dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran yang berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan, sedangkan kelompok lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan. Secara garis tentang jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas serta pengakuan dan pengukurannya pada neraca dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca aset terbagi atas 2, yaitu:

(a) Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

(b) Aset Non lancar

Aset non lancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, serta aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca, aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

(2) Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah terbagi 2 jenis, yaitu:

(a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

(b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu diatas 12 (dua belas) bulan.

(3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

c) Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- 1) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

- 2) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

d) Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

e) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

f) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan setidaknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fisikal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisiar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

D. Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan.

Perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1) Perbedaan Tujuan

Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan, yaitu untuk Akuntansi pemerintahan mempunyai tujuan nirlaba, sedangkan bagi komersial jelas tujuannya adalah mencari laba. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan data akuntansinya, yaitu:

- a) Tidak adanya perhitungan laba-rugi pada pemerintahan, sedangkan pada perusahaan bisnis angka laba-rugi sangat penting. Pada umumnya, di pemerinthan terdapat perhitungan anggaran-realisisasi dan perhitungan pendapatan-belanja, yang akan menghasilkan angka surplus atau defisit.

- b) Tidak adanya masalah penilaian kembali (revaluasi) atas aktiva atau asset pada akuntansi komersial dimungkinkan adanya penilaian kembali aktiva dengan syarat-syarat tertentu.
- c) Masalah penyusutan atau depresiasi atas aktiva tetap tidak penting pada akuntansi pemerintahan, sedangkan pada Akuntansi komersial terdapat hal tersebut.
- d) Prinsip perbandingan beban dengan pendapatan pada akuntansi pemerintahan tidak ada, yang ada adalah perbandingan anggaran-realisisasi dari pendapatan belanja.

2) Masalah Pendapatan

Pendapatan pada pemerintahan sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang bersifat pemaksaan (*compulsory*) dimana atas penerimaan tersebut, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal balik yang bersifat langsung kepada para wajib pajak. Sedangkan pada perusahaan bisnis, pendapatan diperoleh dari pihak-pihak yang secara sukarela memerlukan barang atau jasa, serta terdapat kewajiban yang langsung dari perusahaan kepada pihak pembeli barang atau jasa.

3) Masalah Beban

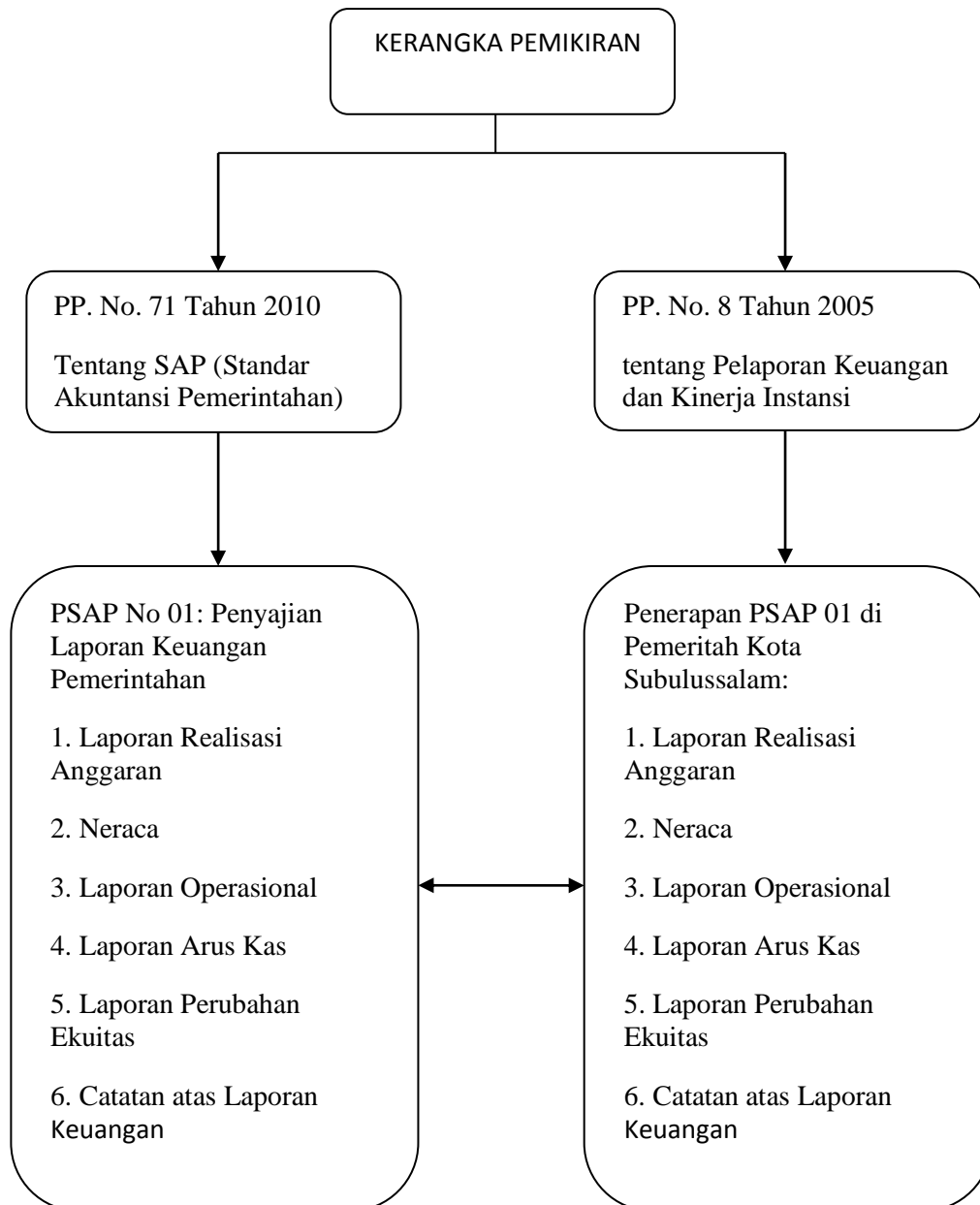
Pada akuntansi komersial terdapat istilah *expense* (beban), sedangkan pada akuntansi pemerintahan menggunakan istilah *expenditure* (kurang lebih berarti pengeluaran anggaran atau belanja).

4) Masalah Penganggaran

Pada Akuntansi pemerintahan terdapat akuntansi anggaran (*budgetary accounting*), anggaran tersebut termasuk dalam sistem akuntansi serta terdapat akun atau rekening (*account*) “anggaran” dalam bagan rekening (*chart of account*). Sedangkan dalam akuntansi keuangan, walaupun terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak termasuk dalam sistem akuntansi dan karenanya tidak terdapat rekening “anggaran” pada bagan atau klasifikasi rekening. Dalam hal ini, penandingan antara anggaran dengan realisasinya dilakukan diluar akuntansi (*extra comptabel*).

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Kajian Terdahulu

1. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Selatan

Hasil penelitian Safrio yang berjudul “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Selatan” menyatakan bahwa Dinas kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Prosedur Akuntansi SKPD yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengacu pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

2. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan

Hasil penelitian Umi Riyanti yang berjudul: “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan” mengemukakan kesimpulan bahwa, Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan ternyata belum memahami terhadap pelaporan Keuangan Pemerintah yang memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka seharusnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan harus bisa memahami terhadap laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang meliputi : Laporan Realisasi anggaran, Penyusunan Neraca Pemerintah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Tetapi pada

Pemerintah Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan hanya membuat laporan Realisasai Anggaran saja. Dalam pernyataan Anggaran, masing-masing unit kerja sudah membuat anggaran pendapatan dan anggaran belanja unit kerja berdasarkan visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dilampirkan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan ke dalam laporan Realisasai Anggaran.

Tabel 1.1
Kajian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
Safrio (2016)	Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Selatan	Kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.	Dinas kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Prosedur Akuntansi SKPD yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dengan menggunakan aplikasi

			SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Umi Riyanti (2011)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan	Kesesuaian pencatatan pelaporan Keuangan Pemerintah yang memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan ternyata belum memahami terhadap pelaporan Keuangan Pemerintah yang memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana yang terstruktur dari penyelidikan yang digambarkan untuk memperoleh jawaban tentang pertanyaan penelitian. Pada pengertian luas, desain penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perancangan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan dalam arti sempit dan khusus, desain penelitian adalah prosedur pengumpulan dan analisis data, yang dalam artian menjelaskan metode pengumpulan data dan metode analisis apa saja yang digunakan untuk menjelaskan penelitian.¹⁸

Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Pendekatan kualitatif deskriptif ekonomi tidak berupaya mengembangkan penyelidikan menurut dimensi ruang lingkup yang terlalu luas, dan tidak mengarahkan penyelidikan mengungkap objek material fakta ekonomi pada dimensi atau pada masa yang telah berlalu, juga tidak untuk mendapatkan pengetahuan tentang perkiraan-perkiraan kemungkinan peristiwa ekonomi yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Melainkan dalam pendekatan kualitatif deskriptif ekonomi, gambaran-gambaran yang digali dan ditemukan hanya sebatas untuk mendapatkan pemahaman atas fenomena yang berada pada ruang lingkup

¹⁸ Arfan Ikhsan. Misri, *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 86.

kekinian dan sebatas pada dimensi tempat dan waktu saat perilaku berlangsung.¹⁹ Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam ini, diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan beberapa unsur yang menyangkut pelaporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam dengan PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.

B. Variabel Penelitian

Variabel pokok pada penelitian ini adalah mengenai Penyajian Laporan Keuangan. Setiap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1. Tentang Laporan Keuangan Pemerintah. PSAP No. 1 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai Laporan Keuangan. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam. Sedangkan objek penelitiannya adalah Kantor Pusat Pemerintah Kota Subulussalam.

¹⁹ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 181-188.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dapat berupa studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalan data lewat studi dokumentasi menjadi pelengkap proses penelitian kualitatif. Bahkan tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada.²⁰ Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam yang telah dipublikasikan, untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan PSAP No. 1.

Teknik yang kedua adalah teknik observasi, observasi adalah kegiatan mengamati secara cermat dan seksama terhadap fakta, data yang mengandung informasi ekonomi yang tergal yang menjadi penyusun objek peristiwa yang diselidiki.²¹ Observasi dapat dibagi dalam beberapa jenis, yakni:²² observasi partisipatif, observasi tersamar, dan observasi tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi partisipatif dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, yakni pada Pemerintah Kota Subulussalam.

Teknik yang terakhir adalah teknik wawancara, wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.²³

²⁰Sujoko Efferin, *et al*, *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 330-331.

²¹Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 205.

²²Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 205.

²³Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, h. 207.

Adapun beberapa langkah yang bisa dikerjakan dalam proses pengumpulan dan analisis data pada pendekatan kualitatif deskriptif ekonomi adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Mengenali objek melalui observasi atau pengamatan secara seksama dengan bantuan kata “tanya”; di antaranya apa?, di mana?, kapan?, bagaimana?, mengapa?, siapa?, seberapa banyak?, dan berapa lama?.
- 2) Jawaban pokok dalam proses observasi atas kata tanya, dikembangkan lebih jauh dengan memperinci lebih detail menurut proses analisis dan sintesis atas bagian atau komponen-komponen terkait.
- 3) Menggunakan hasil observasi terperinci sebagai bahan wawancara atau diskusi dengan subjek penelitian untuk mendapatkan konfirmasi tentang objek tersebut menurut persepsi dan pemahaman subjek. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan makna yang berasal dari *mindset* peneliti.
- 4) Peneliti harus terbuka dengan informasi apapun yang bersumber dari ide dasar subjek fenomena (pelaku ekonomi), artinya informasi yang tanpa ditanyakan atau tanpa diajukan oleh peneliti, bilamana secara alamiah muncul inisiatif subjek mengungkapkan informasi secara mendalam dan panjang lebar.
- 5) Menyusun informasi yang diperoleh dari subjek tersebut menurut kategori atau klasifikasi yang kontekstual.
- 6) Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti, baik pada dimensi waktu saat peristiwa berlangsung maupun kemungkinannya di masa yang akan datang. Wawancara ini ditempuh untuk kepentingan mengungkap informasi yang tidak terangkai dalam observasi.
- 7) Melakukan wawancara lanjutan yang lebih frekuentif untuk mendapatkan informasi yang lebih luas, menggali informasi lebih dalam tentang realitas logika, realitas etika, dan realitas lainnya, guna mendapatkan pemahaman lebih utuh dan makna yang tepat.

²⁴ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 206-209.

- 8) Melengkapi dan menata kembali akurasi informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dengan melakukan wawancara konfirmasi pada *co-actor* yakni untuk mendapatkan informasi mengenai keterkaitan konteks (hubungan ekonomi dan hubungan kerja) dengan subjek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang ditemukan oleh Miles dan Huberman. Pada buku yang ditulis oleh Imam Gunawan yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, dalam menganalisis data terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan, yakni (1) tahapan reduksi data; (2) tahap pemaparan data; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁵

²⁵Rahmat Sahid, *Sangit26.blogspot.co.id*. Diakses pada tanggal 30 November 2017.

Garis Besar Isi Skripsi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan apakah penyajian laporan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan penyajian laporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAP 01). Penelitian ini ditulis dan dibagi menjadi beberapa bab, sebagaimana berikut ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PENELITIAN RELEVAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka teori yang di dalamnya memuat laporan keuangan dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan beserta kajian-kajian terdahulu.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab tiga secara singkat membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

BAB IV. PEMBAHASAN

Merupakan uraian dari hasil penelitian dan uraian singkat mengenai profil perusahaan yang menjadi objek penelitian.

BAB V. PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Lingkungan Geografis Pemerintah Kota Subulussalam

Kota Subulussalam merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang masih relatif muda, juga mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota di pantai Barat-Selatan Provinsi Aceh dan merupakan pintu masuk ke Aceh dari sebelah selatan karena berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Secara Geografis Kota Subulussalam terletak pada posisi $02^{\circ} 27' 30'' - 03^{\circ} 00' 00''$ LU/ North Latitude dan $097^{\circ} 45' 00'' - 98^{\circ} 10' 00''$ BT/ East Latitude. Kota Subulussalam dalam konstelasi regional berada di bagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkal; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Secara Administrasi Pemerintahan, Kota Subulussalam memiliki 5 Kecamatan dengan 74 Desa yaitu Kecamatan Simpang Kiri yang terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Penanggalan yang terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Rundeng yang terdiri dari 23 Desa, Kecamatan Sultan Daulat yang terdiri dari 17 Desa serta Kecamatan Longkib dengan 10 Desa.

Kota Subulussalam memiliki luas wilayah 1.391 km² dengan luas kecamatan yang terbesar adalah Kecamatan Sultan Daulat (43,3%), sedangkan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Penanggalan (6,7%).

Topografi

Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Subulussalam diklasifikasikan menjadi 3(Tiga) bagian, yaitu:

- Dataran Rendah yang menjadi dominasi karakteristik bentang alam kota subulussalam, dengan kemiringan 0⁰ – 2⁰ dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 45%;
- Daerah/dataran landai dengan kemiringan 5⁰ – 15⁰ dengan persentase luas terhadap luas kota adalah 26,45%.
- Dataran perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan 15⁰ – 100⁰, yaitu:
 - a. Daerah perbukitan dengan kemiringan 15⁰ – 40⁰ dengan prosentase luas terhadap luas kota adalah 17%; dan
 - b. Daerah pegunungan terjal dengan kemiringan melebihi 40⁰ dengan prosentase luas terhadap luas kota adalah 1,12%.

Morfologi

Morfologi Kota Subulussalam secara umum bervariasi, baik morfologi berupa perbukitan maupun morfologi bergelombang dan lahar datar. Morfologi kota subulussaalam berbukit dibagian timur dan kemudian semakin ke arah barat semakin bergelombang dan mendatar. Bagian tertinggi Kota Subulussalam mencapai ketinggian 1.000 mdpl, sedangkan bagian terendah berada pada ketinggian 50 mdpl, sehingga dengan adanya margin yang cukup tinggi antara ketinggian terendah dengan ketinggian tertinggi ini, dapat dikatakan bahwa Kota Subulusalalam memiliki kondisi morfologi yang unik dimana baik dataran maupun pegunungan terdapat pada kota ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka morfologi diwilayah Kota Subulussalam dapat dibagi menjadi 3(Tiga) satuan morfologi yaitu satuan morfologi perbukitan terjal, satuan morfologi perbukitan bergelombang, dan satuan morfologi pendataran.

- Satuan Morfologi Perbukitan Terjal, dicirikan oleh rangkaian pegunungan yang tingginya antara 800-1.000 mdpl dan keterjalan lebih dari 40o. Aliran sungai mempunyaai pola dendritik – sub dendritik, sebagian trellis karena mengikuti pola patahan, dengan lembah sungai yang sempit, biasanya berbentuk V dan sebagian kecil cenderung U, menunjukkan tingkat erosi mud menuju dewasa.
- Satuan Morfologi Perbukitan Bergelombang Landai, dicirikan oleh perbukitan dengan ketinggian antara 100-800 mdpl dan kemiringan lereng antara 15o-40o. Pola aliran sungai dendritik, dengan lembah berbentuk U dan sebagian berbentuk V, menunjukkan tingkat erosi dewasa. Satuan ini umumnya ditempati oleh batual vulkanik dan sedimen.
- Satuan Morfologi Pedataran merupakan daerah datar atau dengan kemiringan lereng antara 0° hingga 15° dan pola aliran anyaman “*braided stream*” yang umum terjadi di daerah muara sungai.

2. Dasar Pembentukan

Kelembagaan Pemerintah Kota Subulussalam disusun berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, Qanun Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Subulussalam, Qanun Kota Subulussalam Nomor 03 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Subulussalam terdiri dari 14 Dinas Daerah, 9 Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan 5 Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota Subulussalam melalui

Sekretaris Daerah Kota Subulussalam. Dalam bidang sanitasi, terutama dalam rangka pelaksanaan Program

Percepatan Sanitasi Permukiman, telah dibentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kota Subulussalam dengan Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/49/2013, Tanggal 13 Maret 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Subulussalam Tahun 2013, dimana anggota-anggotanya terdiri dari lintas SKPK, dan stakeholder sektor sanitasi di Kota Subulussalam.

SKPK Kota Subulussalam yang terlibat dalam Pokja Sanitasi terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Subulussalam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi SKPK

Adapun tugas pokok dan fungsi SKPK Sekretariat Daerah Kota Subulussalam adalah:

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Subulussalam adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pemerintahan.

b. Fungsi

Sedangkan fungsi SKPK Sekretariat Daerah Kota Subulussalam adalah:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- 2) Pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan tugasnya.
- 3) Penyusunan program kerja tahunan Sekretariat Daerah kota Subulussalam.

- 4) Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia untuk manusia untuk pengembangan pada bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan keterlaksanaan.
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 7) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Struktur Organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Subulussalam



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Subulussalam

Uraian Tugas

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, koordinasi dan penyusunan program di bidang Kelembagaan, Analisis Jabatan dan Beban Kerja, Formasi Jabatan, Tatalaksana, Akuntabilitas dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah;
- 2) penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pembinaan analisa jabatan dan beban kerja serta formasi jabatan;
- 3) penyiapan rumusan bahan tugas dan fungsi jabatan struktural;
- 4) pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang ketatalaksanaan meliputi standar pelayanan, standar prosedur pelayanan, road map reformasi birokrasi serta norma dan budaya kerja;
- 5) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kota dan sekretariat daerah;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah;
- 7) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pembinaan disiplin dan penilaian kinerja aparatur sekretariat daerah;
- 8) pelaksanaan penyiapan dan penetapan pensiun aparatur sipil negara sekretariat daerah;
- 9) pelaksanaan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, di lingkungan sekretariat daerah; dan

- 10) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Dan Umum, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Organisasi, terdiri dari:

- 1) Sub bagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi Jabatan;
- 2) Sub bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi; dan
- 3) Sub bagian Pendayagunaan Aparatur dan Akuntabilitas.
 - Subbagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta koordinasi di bidang kelembagaan organisasi perangkat daerah, penyusunan analisa jabatan dan beban kerja, pemeringkatan jabatan, penyusunan pedoman dan rincian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - Subbagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta koordinasi di bidang ketatalaksanaan meliputi penyusunan norma standar dan prosedur, pelayanan publik dan reformasi birokrasi; dan
 - Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta koordinasi di bidang pembinaan kepegawaian, penyiapan bahan administrasi kepegawaian, dan peningkatan kapasitas pegawai dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dan Pemerintah Kota.

B. Hasil Temuan Peneliti

1. Perlakuan Akuntansi Keuangan pada Pemerintah Kota Subulussalam

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Laporan Operasional
- d) Laporan Perubahan Ekuitas
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Daerah Kota Subulussalam. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan – LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dio, pensasikan dengan pengeluaran).

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjaaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset lancar, Aset tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendak BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dibidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan rusak yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa Manfaat.

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (Kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain – lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* diklarifikasikan menjadidi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

2. Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Subulussalam

a. Laporan Realiasi Anggaran

Laporan Realiasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara tahun sekarang dengan sebelumnya.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2015

**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2015 DAN 2014**

NO. UR UT	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	REALISASI 2014
5	BELANJA	41.299.390.567,00	40.794.003.353,00	15.987.002.949,00
5.1	BELANJA OPERASI	29.875.057.152,00	29.595.845.659,00	12.086.053.977,00
5.1.1	Belanja pegawai	12.203.016.767,00	12.056.596.617,00	12.086.053.977,00
5.1.2	Belanja barang dan jasa	17.672.040.385,00	17.539.249.042,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	111.424.333.415,00	11.198.157.694,00	3.900.948.972,00
5.2.1	Belanja modal tanah	4.791.750.000,00	4.764.368.956,00	571.454.972,00
5.2.2	Bel. modal peralatan & mesin	4.835.201.275,00	4.643.501.738,00	2.228.744.000,00
5.2.3	Bel. modal gedung & bangunan	1.718.967.140,00	1.711.872.000,00	1.085.350.000,00
5.2.5	Bel. modal aset tetap lainnya	78.415.000,00	78.78.415.000,00	15.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.299.390.567,00)	(40.794.003.353,00)	(15.987.002.949,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(41.299.390.567,00)	(40.794.003.353,00)	(15.987.002.949,00)

SUBULUSSALAM, 1 Januari 2015

Sekretariat Daerah Kota Subulussalam

Tabel 4.1 Laporan Realiasi Anggaran

b. Neraca

neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Berikut Neraca untuk Tahun 2015

NERACA
PEMERINTAH KOTA SUBULUSALAM
Per 31 Desember 2014

Urusan Pemerintahan : 1.10		Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	
Unit Organisasi : 1.20.03		Sekretariat Daerah	
Uraian	2015	2014	
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00		0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.080.000,00		0,00
Kas di BLUD	0,00		0,00
Kas lainnya	0,00		0,00
Setara Kas	0,00		0,00
Investasi jangka pendek	0,00		0,00
Piutang pendapatan	0,00		0,00
Piutang lainnya	0,00		0,00
Penyisihan piutang	0,00		0,00
Beban dibayar di muka	0,00		0,00
Persediaan	5.779.900,00		3.632.000,00
JUMLAH ASET	6.859.900,00		3.632.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi jangka panjang non permanen			
Investasi jk. panjang kepada entitas	0,00		0,00
lainnya	0,00		0,00
Investasi dalam obligasi	0,00		0,00
Investasi dalam proyek pembangunan	0,00		0,00
Dana bergulir	0,00		0,00
	0,00		0,00

Deposito jangka panjang		
Investasi non permanen lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi jangka panjang non permanen	0,00	0,00
	0,00	0,00
Inestasi jangka panjang permanen	0,00	0,00
Penyertaan modal permanen Daerah	0,00	0,00
Investasi permanen lainnya		
JUMLAH Investasi jangka panjang permanen		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	35.917.948.365,00	30.681.470.409,00
	25.490.344.244,00	20.761.384.506,00
	57.589.855.168,00	55.942.983.168,00
ASET TETAP	1.683.410.900,00	1.683.410.900,00
Tanah	239.413.382,00	160.998.382,00
Peralatan dan mesin	0,00	0,00
Gedung dan bangunan	(29.820.114.149,00)	0,00
Jalan, irigasi, dan jaringan		
Aset tetap lainnya		109.230.247.365,00
Konstruksi dalam pengerjaan	91.100.857.910,00	
Akumulasi penyusutan	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	0,00	0,00
DANA CADANGAN	0,00	0,00
Dana Cadangan		
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
	0,00	0,00
ASET LAINNYA	0,00	0,00
Tagihan jangka pendek	1.153.206.700,00	1.138.664.700,00
Kemitraan dengan pihak ketiga		
Aset tidak berwujud		1.138.664.700,00
Aset lain-lain	1.153.206.700,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	92.260.294.510,00	110.372.544.065,00
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)		

Tabel 4.2. Neraca

Urusan Pemerintahan : 1.10 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian		
Unit Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Daerah		
Uraian	2015	2014
Utang bunga	0,00	0,00
Bagian lancar utang jangka panjang	0,00	0,00
Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00
Utang beban	0,00	0,00
Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang dalam negeri	0,00	0,00
Utang jangka panjang lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS	92.260.924.510,00	110.372.544.065,00
EKUITAS	92.260.924.510,00	110.372.544.065,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

c. Laporan Operasional

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES 2015 DAN 2014

NO	URAIAN	SALDO 2015	SALDO 2014	Kenaikan/pe nurunan	(%)
8	PENDAPATAN- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
8.1.1	Pendapatan pajak daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan retribusi daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pend. pengelolaan kekayaan yg dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD yang sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Pendapatan zakat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan transfer pemerintah pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan keuangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PEND. DAERAH YANG SAH-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Surplus penjualan aset non lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus penyelesaian kewajiban jk. panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan luar biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN				
		35.767.530.176,00	0,00	35.767.530.176,00	0,00
	BEBAN OPERASI	35.767.530.176,00	0,00	35.767.530.176,00	0,00

Tabel 4.2. Laporan Operasional

NO	URAIAN	SALDO 2015	SALDO 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
	Beban pegawai-LO	12.056.596.617,00	0,00	12.056.596.617,00	0,00
	Beban barang dan jasa-LO	17.537.101.142,00	0,00	17.537.101.142,00	0,00
	Beban bunga-Lo	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00		0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.173.832.417,00	0,00	6.173.832.417,00	0,00
9.1.8	Beban penyisihan utang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban transfer bagi hasil pajak daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban transfer bagi hasil penda. lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban bantuan keuangan ke pem. daerah lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban transfer bantuan keuangan ke desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban bantuan keuangan ke partai politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban transfer dana otonomi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.7	Beban transfer bantuan keuangan ke mukim	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit penjualan aset non lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit penyelesaian kewajiban jk	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Defisit dari kegiatan non operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban luar biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(35.767.530.176,00)	0,00	(35.767.530.176,00)	0,00

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Berikut bentuk Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2015

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Tabel 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Urusan Pemerintahan : 1.10 Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adm KeuDa,		
Perangkat Daerah, Kepegawaian		
Unit Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Daerah		
Uraian	2015	2014
EKUITAS AWAL	110.372.544.065,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(35.767.530.176,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
:	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	(23.139.172.732,00)	0,00
Koreksi Ekuitas lainnya	51.465.841.157,00	0,00
EKUITASI AKHIR		

SUBULUSSALAM, 1 Januari 2015

Sekretariat Daerah Kota Subulussalam

Penjelasan atas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Subulussalam

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Belanja pada TA 2015 adalah sebesar Rp 40.794.003.353 atau mencapai 98,78 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 41.299.390.567.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 92.203.380.829,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 6.859.900,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 91.043.314.229,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 1. 153.206.700,0.

Nilai Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 92.302.380.829,00.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 30.143.533.743, 00 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp. 30.143.533.743, 00. Surplus kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan sebesar Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 30.143.533.743, 00.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp. 110.372.544.065,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 30.143.533.743, 00. Kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 28.820.712.846 dan ditambah Transaksi Antaar Entitas sebesar Rp. 28.820.712.846 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 0,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 51.408.297.476

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

3. Analisis Penulis Terhadap Perbandingan Unsur-unsur Laporan Keuangan yang di Tetapkan PSAP dengan Unsur-unsur Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Subulussalam.

Tabel 4.5 Analisis Penulis

NO	Bentuk LK (Y)	MENURUT PSAP	Penerapannya di Pemerintah Kota Subulussalam	KESESUAIAN-NYA (X)
1	Laporan Realisasi Anggaran	LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sbb: -pendapatan -belanja -transfer -surplus/defisit -pembiayaan -sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Hanya menyajikan unsur belanja Saja	17
2	Neraca	Neraca mencantumkan pos-pos berikut: -kas dan setara kas -investasi jk. Pendek -piutang pajak dan bukan pajak -persediaan -investasi jk.panjang -aset tetap -kewajiban jk.pendek -kewajiban jk.panjang -ekuitas dana	Pos-pos yang disajikan: -kas dan setara kas -investasi jk. Pendek -piutang pajak dan bukan pajak -persediaan -investasi jk.panjang -aset tetap -kewajiban jk.pendek -kewajiban jk.panjang -ekuitas dana	100
3	Laporan Operasional	LO menyajikan pos-pos sbb: -pendapatan dari kegiatan operasional -beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi	Pos-pos yang disajikan: -pendapatan dari kegiatan operasional -beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi -surplus atau deficit	100

		-surplus atau deficit		
4	Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.	menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.	100
5	Laporan Perubahan Ekuitas	Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sbb: -ekuitas awal -surplus/defisit-LO -koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. -ekuitas akhir	Pos-pos yang disajikan: -ekuitas awal -surplus/defisit-LO -koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. -ekuitas akhir	100
6	Catatan atas Laporan Keuangan	CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLk	CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLk.	100

$$\sum X = 517$$

Keterangan	Perhitungannya
SS (Sangat Sesuai) = 80 – 100	rata-rata = $\sum X/Y$
S (Sesuai) = 50 - 80	= $517/6 = 86$
CS (Cukup Sesuai) = 10 – 50	Jadi, Kesesuaiannya = 86%

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melihat data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh dari Instansi Sekretariat Daerah Kota Subulussalam, bahwasanya laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara//Lembaga yang dipimpinnya.

Pemerintah Kota Subulussalam adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

B. Saran

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Dalam Menyusun Laporan Realisasi Anggaran, harus lebih memperhatikan lagi dan menyesuaikannya terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut SAP, Laporan Relisasi Anggaran menyajikan Unsur-unsur Sbb:

-Pendapatan;

-Belanja;

-Transfer;

-Surplus/Defisit;

-Pembiayaan; dan

-Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

Sedangkan LRA yang disajikan di Pemerintah Kota Subulussam hanya hanya menyajikan Unsur Belanja saja.

2. Untuk Tahun Anggaran berikutnya hendaknya Pemerintah Kota Subulussalam tetap menggunakan teknik komputerisasi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan daerah dan mengembangkan sistem komputer tersebut dengan tetap memperhatikan Peraturan-peraturan yang telah diperbaharui agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan laporan Keuangan yang disajikan dapat berguna bagi setiap pengguna laporan keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014.
- Effendy, Yuswar. *et al. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Medan: Perdana Publishing. 2015.
- Efferin, Sujoko. *et al. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Ikhsan, Arfan. Misri. *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Medan: Citapustaka Media Perintis. 2012.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Martani, Dwi *et al. Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Menteri Agama. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara pentafsiran Al-qur'an. 1971.
- Nordiawan, D. Iswahyudi, S. P. dan Maulidah, R. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmat Sahid, *Sangit26.blogspot.co.id*. Diakses pada tanggal 30 November 2017.
- Reeve, James M. *et al, Pengantar Akuntansi: i Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013.
- Ridho Syukro, <http://www.beritasatu.com>. Diunduh pada tanggal 25 Januari 2018.
<https://www.goaceh.co/berita/baca/2016/07/23/laporan-keuangan-apbk-subulussalam-2015-dari-wtp-menjadi-wdp/#sthash.VfhgkiKG.dpbs>.
Diunduh pada tanggal 9 maret 2018.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Fitri Rahmadani
2. NIM : 51143207
3. Tpt/Tgl Lahir : Subulussalam, 05 Februari 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : JL. Abadi, Kec. SP. Kiri Kota Subulussalam
6. Email : rahmadanifitri390@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2002 - 2008 : SDN 1 SP KIRI SUBULUSSALAM
2. 2008 - 2011 : SMPN 1 SP KIRI SUBULUSSALAM
3. 2011 - 2014 : SMN 1 SP KIRI SUBULUSSALAM

LAMPIRAN I
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
BAGIAN I.

IDENTITAS PERUSAHAAN, PEWAWANCARA, DAN NARASUMBER

A. Identitas Organisasi/Perusahaan

A.1.Nama Organisasi/Instansi	: SETDAKO KOTA SUBULUSSALAM
A.2.Bidang Gerak Organisasi/Instansi	: PEMERINTAHAN
A.3.Alamat Organisasi/Instansi	: KOMPLEK PERKANTORAN KOTA SUBULUSSALAM DESA LAE ORAM
A.4. No. Telp/Fax	: (061) 6871177

B. Identitas Pewawancara

B.1. Nama	: FITRI RAHMADANI
B.2. NIM	: 51143207
B.3. Jurusan/Prodi	: AKUNTANSI SYARIAH
B.4. Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

C. Identitas Narasumber

C.1. Nama	: Endang Suryani
C.2. Jabatan	:
C.3. Instansi	: SETDAKO PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

C.4. Tanda Tangan	:
-------------------	---

D. Waktu Pelaksanaan

D.1. Hari/Tanggal	: 05 Juli 2018
D.2. Pukul	:
D.3. Tempat	:

BAGIAN II

HASIL WAWANCARA

A. UMUM

1. Bagaimanakah strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Kota Subulussalam?
2. Apakah penerapan PSAP 01 di Pemerintah Kota Subulussalam sudah berjalan dengan baik?
3. Apa saja kendala yang dihadapi ketika menerapkan PSAP 01?
4. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan agar penerapan PSAP 01 sesuai dengan yang diharapkan?
5. Apa arti penting penerapan PSAP 01 bagi perusahaan di Pemerintah Kota Subulussalam?
6. Apakah peran teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan keuangan Pemerintah kota Subulussalam?
7. Apakah kompetensi sumberdaya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan keuangan Pemerintah kota Subulussalam?
8. Apakah internal audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan keuangan Pemerintah kota Subulussalam?

B. STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimanakah mekanisme sistem akuntansi pemerintahan Pemerintah Kota Subulussalam? (Mohon dijelaskan struktur birokrasi)!
2. Unit apa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan?
3. Apakah dalam pelaksanaan SAP, petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasi kerja yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mudah di dapat dan dimengerti oleh para pegawai?
4. Apakah Pemerintah Kota Subulussalam juga membuat peraturan pelaksanaan mengenai penyusunan laporan keuangan?
5. Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan?

C. SUMBER DAYA

1. Apakah di Divisi/unit terkait telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam pelaksanaan SAP?
2. Apakah sarana yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan telah memadai di divisi atau unit terkait?
3. Apakah pemberian wewenang di Divisi atau unit terkait telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan?
4. Apakah diperlukan insentif untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan?

D. KOMUNIKASI

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan?
2. Hambatan atau kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP?
3. Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di unit terkait?
4. Laporan apa saja yang disusun oleh Pemerintah Kota Subulussalam dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan?
5. Apakah Pemerintah Kota Subulussalam menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sendiri?

E. SIKAP/DISPOSISI

1. Apakah menurut Bapak/Ibu, manfaat PSAP 01 dapat menghasilkan laporan keuangan dengan baik?

F. PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

1. Kapan Penerapan SAP Berbasis Akruwal mulai diterapkan di Pemerintah Kota Subulussalam? pada tahun anggaran 2016
2. Apakah Pemerintah Kota Subulussalam sudah sepenuhnya menerapkan SAP Akruwal berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010? Sudah
3. Apa saja kendala dalam pengimplementasian akuntansi akruwal dan bagaimana bentuk serta upaya Pemerintah Kota Subulussalam dalam menanganinya?
4. Bagaimana hasil opini BPK terhadap laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Kota Subulussalam pada tahun 2015? Dan apa alasannya?

LAMPIRAN II
Hasil Wawancara

A. UMUM

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Kota Subulussalam?	Mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP Berbasis akrual, persiapan yang memadai mulai dari peningkatan kemampuan SDM, dan pengadaan sarana dan prasarana yang kompatibel,
2	Apakah penerapan PSAP 01 di Pemerintah Kota Subulussalam sudah berjalan dengan baik?	Iya, sudah berjalan dengan baik
3	Apa saja kendala yang dihadapi ketika menerapkan PSAP 01?	Tidak ada kendala sama sekali, PSAP 01, merupakan acuan bagi bagian keuangan dalam menyusun laporan keuangan di pemerintah kota subulussalam.
4	Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan agar penerapan PSAP 01 sesuai dengan yang diharapkan?	-menyediakan sistem yang terintegrasi -kita harus mengikuti, panduan dari PSAP 01, dan laporan keuangan yang kita buat, harus sesuai dengan PSAP 01.
5	Apa arti penting penerapan PSAP 01 bagi perusahaan di Pemerintah Kota Subulussalam?	memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas.
6	Apakah peran teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan keuangan Pemerintah kota	Iya

	Subulussalam?	
7	Apakah kompetensi sumberdaya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan keuangan Pemerintah kota Subulussalam?	Iya
8	Apakah internal audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan keuangan Pemerintah kota Subulussalam?	Iya

B. STRUKTUR BIROKRASI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Unit apa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan?	Biro Keuangan
2	Apakah dalam pelaksanaan SAP, petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasi kerja mudah di dapat dan dimengerti oleh para pegawai?	Iya, Pegawai yang di tetapkan dan ditugaskan melaksanakan SAP, dalam menyusun Laporan Keuangan harus betul-betul mengerti dan cerdas dalam memahami SAP
3	Apakah Pemerintah Kota Subulussalam juga membuat peraturan pelaksanaan mengenai penyusunan laporan keuangan?	Iya
4	Bagaimanakah pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan?	Melalui rapat, menyajikan laporan keuangan, sebisanya dalam tiga bulan satu kali, dan paling lambat penyajiannya, dalam jangka waktu enam bulan / per smesteran.

C. SUMBER DAYA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah di Divisi/unit terkait telah memiliki jumlah pegawai yang memadai	Iya

	dalam pelaksanaan SAP?	
2	Apakah sarana yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan telah memadai di divisi atau unit terkait?	Iya
3	Apakah pemberian wewenang di Divisi atau unit terkait telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan?	Iya
4	Apakah diperlukan insentif untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan?	Tidak

D. KOMUNIKASI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peran dan tanggung jawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan?	Pimpinan perusahaan mengawasi transaksi, terutama transaksi yang material dan bertanggung jawab penuh atas laporan keuangan dengan menandatangani laporan keuangan.
2	Hambatan atau kendala apa saja yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan SAP?	Tidak ada
3	Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di unit terkait?	Laporan dari biro keuangan, data yang diterima dalam sistem, dan seluruh transaksi.
4	Laporan apa saja yang disusun oleh Pemerintah Kota Subulussalam dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan?	-Laporan Realisasi Anggaran -Neraca -Laporan Operasional -Laporan Perubahan Ekuitas,

		dan -Catatan atas Laporan Keuangan
5	Apakah Pemerintah Kota Subulussalam menetapkan suatu peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sendiri?	Iya

E. SIKAP/DISPOSISI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah menurut Bapak/Ibu, manfaat PSAP 01 dapat menghasilkan laporan keuangan dengan baik?	Iya, sangat baik, mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum ,dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antarentitas.

F. PENERAPAN KUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI mulai diterapkan di Pemerintah Kota Subulussalam?	pada tahun anggaran 2015
2	Apakah Pemerintah Kota Subulussalam sudah sepenuhnya menerapkan SAP AkruaI berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010? Sdah	Sudah
3	Apa saja kendala dalam pengimplementasian akuntansi akruaI dan bagaimana bentuk serta upaya Pemerintah Kota Subulussalam dalam menanganinya?	dalam mengimplementasikan Laporan Keuangan tersebut menemui beberapa kendala, yaitu sistem dan aplikasi yang digunakan, resistensi terhadap perubahan, kurangnya SDM yang berkompeten dan

		<p>dukungan penuh dari pimpinan. Upayanya ialah: Kendala-kendala tersebut diharapkan adanya pengendalian internal yang memadai agar tercapainya Laporan Keuangan Basis Akrual yang efektif dan efisien dan keandalan pelaporan keuangan. Selain itu dibutuhkan lebih banyak pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bidang akuntansi pemerintah. Penyusunan kebijakan dan sosialisasi di lingkup Pemerintah Kota Subulussalam perlu dilakukan kepada pihak-pihak terkait, sehingga implementasi SAP Berbasis Akrual dapat berjalan dengan baik.</p>
<p>4</p>	<p>Bagaimana hasil opini BPK terhadap laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Kota Subulussalam pada tahun 2015? Dan apa alasannya?</p>	<p>Opini yang di peroleh dari BPK adalah opini WDP (Wajar dengan Pengecualian). Karena, Laporan keuangan pada tahun 2014 masih disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN), Pemerintah Kota Subulussalam belum menerapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.</p>



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.20
Unit Organisasi : 1.20.03

Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain
Sekretariat Daerah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
5	BELANJA	41.299.390.567,00	(40.794.003.353,00)	98,78	15.987.002.949,00
5.1	BELANJA OPERASI	29.875.057.152,00	29.595.845.659,00	99,07	12.086.053.977,00
5.1.1	Belanja Pegawai	12.203.016.767,00	12.056.596.617,00	98,80	12.086.053.977,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.672.040.385,00	17.539.249.042,00	99,25	0,00
5.2	BELANJA MODAL	11.424.333.415,00	11.198.157.694,00	98,02	3.900.948.972,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.791.750.000,00	4.764.368.956,00	99,43	571.454.972,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.835.201.275,00	4.643.501.738,00	96,04	2.228.744.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.718.967.140,00	1.711.872.000,00	99,59	1.085.350.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	78.415.000,00	78.415.000,00	100,00	15.400.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.299.390.567,00)	(40.794.003.353,00)	98,78	(15.987.002.949,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(41.299.390.567,00)	(40.794.003.353,00)	98,78	(15.987.002.949,00)

SUBULUSSALAM, 1 Januari 2015
Sekretaris Daerah Kota Subulussalam

H. DAMHURI, SP. MM

NIP. 19620414 198603 1 010



NERACA
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
Per 31 Desember 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepeg
Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

URAIAN	2015	2014
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.080.000,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	5.779.900,00	3.632.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	6.859.900,00	3.632.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergilir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	35.917.948.365,00	30.681.470.409,00
Peralatan dan Meubel	25.490.344.244,00	20.761.384.506,00
Gedung dan Bangunan	57.589.855.168,00	55.942.983.168,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.683.410.900,00	1.683.410.900,00
Aset Tetap Lainnya	239.413.382,00	160.998.382,00
Konstruksi Dalam Pengetaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(29.820.114.149,00)	0,00
JUMLAH ASET TETAP	91.100.857.910,00	109.230.247.365,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lainnya	1.153.206.700,00	1.138.664.700,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.153.206.700,00	1.138.664.700,00
JUMLAH ASET	92.260.924.510,00	110.372.544.065,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepeg
 Unit Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Daerah

URAIAN	2015	2014
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	92.260.924.510,00	110.372.544.065,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	92.260.924.510,00	110.372.544.065,00



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.20
 Unit Organisasi : 1.20.03
 Urusan Wajib
 Otentikasi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
 Sekretariat Daerah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2015	SALDO 2014	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Pendapatan Zakat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	35.767.530.176,00	0,00	35.767.530.176,00	0,00
9.1	BEBAN OPERASI	35.767.530.176,00	0,00	35.767.530.176,00	0,00
9.1.1	Beban Pegawai - LO	17.056.596.617,00	0,00	12.056.596.617,00	0,00
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	17.537.101.142,00	0,00	17.537.101.142,00	0,00
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1.20 Unit Organisasi : 1.20.03		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretaris Daerah			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2015	SALDO 2014	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.173.832.417,00	0,00	6.173.832.417,00	0,00
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.7	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Mukim	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
		(35.767.530.176,00)	0,00	(35.767.530.176,00)	0,00
		SURPLUS/DEFISIT-LO			

SUBJULUSSALAM, 1 Januari 2015
 Sekretaris Daerah Kota Subjullussalam



H. DAMHURI, SP. MM
 NIP. 19620414 198603 1 010



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Aum KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	
Unit Organisasi : 1 20.03	Sekretariat Daerah	
URAIAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	110.372.544.065,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(35.767.530.176,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(23.139.172.732,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	51.465.841.157,00	0,00

SUBULUSSALAM, 1 Januari 2015
Sekretaris Daerah Kota Subulussalam

H. DAMHURI, SP. MM

NIP. 19620414 198603 1 010